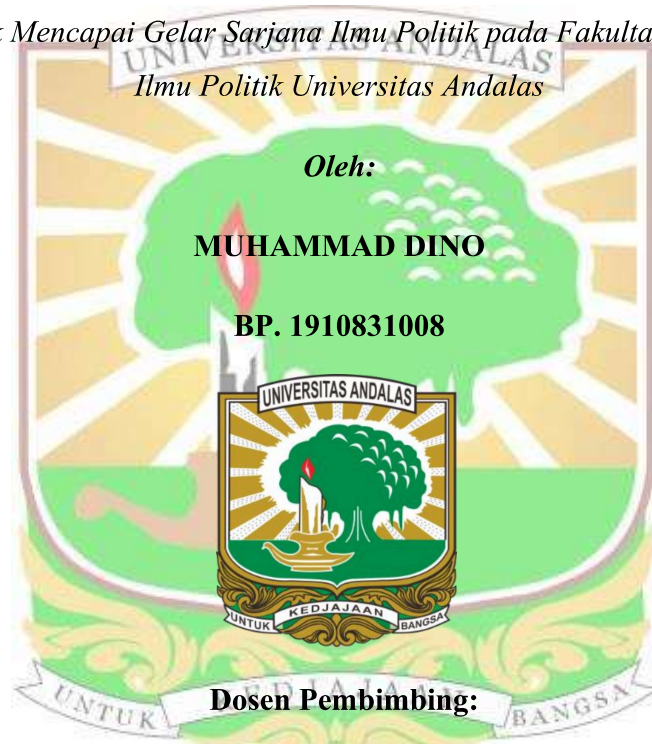


**ANALISIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN NAGARI  
BERPRESTASI DI NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Andalas*



**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Doni Hendrik, M.Soc., Sc**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

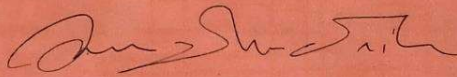
HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Muhammad Dino  
Nomor Buku Pokok : 1910831008  
Judul Skripsi : "Analisis Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berprestasi  
di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman  
Barat"

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Pembimbing I

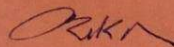


Dr. Doni Hendrik, M.Soc, Sc

NIP. 197906042006041002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas

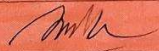


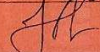



Dr. Tengku Rika Valentina, MA

NIP. 198101012005012001

### HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul “Analisis Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berprestasi di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat” telah diuji di depan sidang Ujian Skripsi Departemen Ilmu Politik pada Tanggal 11 Desember 2023, bertempat di Ruang Sidang Departemen Ilmu Politik, dengan Tim Penguji :

Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Indah Adi Putri, S.IP., M.IP	Ketua	
Dewi Anggraini, S.IP., M.Si	Sekretaris	
Mhd Fajri, S.IP., MA	Anggota	
Irawati, S.IP., MA	Anggota	
Dr. Doni Hendrik, M.Soc., Sc	Pembimbing I	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas



**Dr. Azwar, M.Si**

NIP. 196712261993031001



## PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi dengan judul "**Analisis Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berprestasi di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lain yang berlaku.

Padang, 25 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Muhammad Dino**

**BP.1910831008**

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut telah mengembangkan paradigma dan konsep baru mengenai tata kelola desa secara nasional. Sejalan dengan UU tersebut bahwa Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Program Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Alasan utama pembangunan desa dijadikan fokus Pembangunan Nasional yaitu untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dengan cara mempercepat pembangunan desa-desa mandiri. Dalam membangun desa berprestasi tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi harus adanya upaya dan usaha serta kerja keras dari berbagai pihak. Untuk mengelola sebuah nagari dengan penduduk yang cukup padat tentunya memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan nagari berprestasi di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan teori Tata Kelola Pemerintahan dari Loina Lalolo Krina yang terdiri dari tiga prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan keputusan sudah berjalan dengan baik. Bagaimana interaksi yang dijalin oleh Pemerintah Nagari Kinali dengan masyarakat untuk menerapkan prinsip akuntabilitas yang baik. Pemerintah Nagari Kinali sudah cukup Transparan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari. Hal itu juga didukung oleh adanya website nagari. namun penggunaan website belum efektif secara keseluruhan. Jika dilihat dari partisipasi masyarakatnya, Nagari Kinali memiliki partisipasi yang cukup tinggi. Keikutsertaan masyarakat tersebut dapat dilihat dalam perencanaan pengambilan keputusan, seperti ikut aktif memberikan pendapat. Dalam pelaksanaan mereka juga ikut aktif bersama-sama misalnya pembuatan jalan. Kemudian untuk pelaporan juga bersama-sama dalam mengevaluasi LKPj dari pemerintah nagari.

**Kata Kunci:** Tata Kelola, Pemerintahan, Nagari

## ABSTRACT

Law No. 6/2014 on villages has developed a new paradigm and concept of village governance nationally. In line with this law, President Joko Widodo has launched the third Nawa Cita Program, which is to develop Indonesia from the periphery and strengthen regions and villages within the framework of a unitary state. The main reason for village development to be the focus of National Development is to reduce the gap between villages and cities by accelerating the development of independent villages. In building an outstanding village, it is not as easy as turning the palm of your hand, but there must be efforts and efforts and hard work from various parties. To manage a nagari with a fairly dense population certainly requires good governance. The purpose of this study was to explain how the application of the principles of accountability, transparency and participation in the governance of outstanding nagari in Nagari Kinali, Kinali District, West Pasaman Regency. This research uses Loina Lalolo Krina's Governance theory which consists of three main principles, namely accountability, transparency and participation. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of this study indicate that the decision-making process has gone well. How is the interaction established by the Kinali Nagari Government with the community to implement good accountability principles. The Kinali Nagari Government has been quite transparent in organizing the village government. This is also supported by the existence of a village website. but the use of the website has not been effective as a whole. When viewed from community participation, Nagari Kinali has quite high participation. This community participation can be seen in decision-making planning, such as actively participating in giving opinions. In the implementation they also actively participate together, for example making roads. Then for reporting, they also accompany the bamus in evaluating the LKPj from the nagari government.

**Keywords: Governance, Government, Nagari**

